BAB 1

PENDAHULUAN

Bab pertama dari penelitian ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan judul penelitian. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan upaya pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sebagai tujuan dari pembangunan nasional. Adanya globalisasi di Indonesia memberikan dorongan bagi Indonesia dalam hal pembangunan di berbagai aspek dan bidang agar seluruh masyarakat Indonesia sejahtera. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara nasional ini harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah di Indonesia. Terdapat berbagai tujuan pembangunan nasional yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah percepatan dan pemerataan pembangunan (Nisa, 2019). Menurut Didi (2012), pembangunan sendiri memiliki arti yang sangat luas mencakup segala segi dalam kehidupan manusia tidak hanya berpengaruh pada pelayanan sarana dan prasarana saja, melainkan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan ekonomi di setiap daerah. Pembangunan harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan dilakukan secara bersama oleh seluruh tingkat pemerintahan baik dari pusat

hingga pemerintah daerah yang lebih terpadu, efisien, serta memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu hal yang menjadi pusat perhatian di berbagai negara, meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam mengatasi kemiskinan (Sartika, 2016). Menurut Edward (2013), kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara maupun daerah tersebut. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan kemiskinan merupakan masalah penting yang sampai saat ini menjadi pusat perhatian bagi pemerintah. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya kemiskinan di Indonesia di antaranya adalah tingkat pendidikan yang rendah, kualitas kesehatan yang rendah, terbatasnya modal, hingga lapangan pekerjaan yang semakin terbatas. Menurut data BPS (2019), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 24,79 juta jiwa.

Masalah kemiskinan di Indonesia salah satunya terlihat dari kemiskinan antara perkotaan dengan perdesaan yang masih tinggi. Perbedaan daerah juga merupakan ciri kemiskinan yang terlihat dengan adanya perbedaan antara daerah perdesaan dan perkotaan, kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat perdesaan. Menurut data BPS (2020), tingkat kemiskinan di kota sebesar 7,88%, level perdesaan sudah mencapai *double digit* sebesar 13,20%. Sedangkan untuk indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih tinggi 2,39% dibandingkan di

perkotaan yang berada pada level 1,26%. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dari sisi indeks keparahan, kondisi kemiskinan di perdesaan juga lebih parah berada pada level 0,68%. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan adanya perbedaan pengeluaran antara penduduk miskin.

Pengentasan kemiskinan tidak terlepas dari adanya upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Menurut Kuncoro (2011), salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan desa dan kota adalah dengan melibatkan pemerintah daerah dan setiap masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut. Upaya mengatasi kemiskinan antara desa dan kota pemerintah menerapkan paradigma membangun dari pinggiran yang artinya membangun daerah tertinggal yang berada pada perdesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan diperlukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara dan mempercepat mengatasi kemiskinan.

Desa mempunyai posisi strategis sebagai perubahan dan solusi bagi perubahan sosial. Maka dari itu pemerintah Indonesia memberikan kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa (Dianti Lalira, Amran Nakoko dan Ita F. Rorong, 2018). Di dalam otonomi desa segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa (Prasetyo, 2014). Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Upaya mengatasi masalah kemiskinan di desa diatur melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) tentang desa diberi sumber pendapatan dari dana desa. Dana desa merupakan dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Kementerian Keuangan (2017), setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk disalurkan kepada desa.

Menurut Sumarto (2020), pada tahun 2018 Pemerintah Pusat menganggarkan dana desa sebesar Rp 60 triliun, dan pada tahun 2019 dana desa meningkat menjadi Rp 70 triliun di mana dana desa selalu meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2015 hingga 2019 dana desa terbukti berhasil menghasilkan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat berupa 191,6 ribu km(kilometer) jalan desa, 1.140,4 km jembatan desa, 9 ribu unit pasar desa, 4.175 unit embung desa, 24,8 ribu unit posyandu, 959,6 ribu unit sarana air bersih (Alika, 2019). Tujuan dari adanya dana desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi ketimpangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Kementrian Keuangan, 2017). Dana desa juga dapat membantu pemberdayaan ekonomi

masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru.

Selain adanya dana desa, pemerintah juga memberikan program kebijakan lain sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di desa yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 di mana terdapat program yang serupa telah dilaksanakan di beberapa negara yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT). Program Keluarga Harapan (PKH) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 yang merupakan program bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin dan memiliki 3 komponen penting yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Jumlah penerima manfaat dana tunai dari Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019 mencapai 10 juta jiwa di mana jumlah tersebut sangat banyak, namun masih sebagian kecil dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2019 dana bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) naik menjadi sebesar Rp 34,4 triliun dibanding dengan tahun 2018 yang sebesar Rp 19,4 triliun Idris (2018). Tujuan dari adanya PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung dalam upaya peningkatan kesejahteraan dari kelompok masyarakat miskin. Menurut Adi Sanjaya dan Resnawaty (2018), Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang bentuknya adalah memberi dana tunai kepada masyarakat dan program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan. Program ini meru-

pakan program pengetasan kemiskinan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, di mana pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menyediakan dana agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup yang baik. Dalam jangka pendek PKH bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin, sedangkan dalam jangka panjang program ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, agar generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Indonesia terdiri dari 34 Provinsi yang tidak terlepas dari masalah kemiskinan antara pedesaan dan perkotaan di setiap provinsinya. Di bawah ini merupakan data jumlah persentase kemiskinan perdesaan dan perkotaan di 34 Provinsi di Indonesia. Dalam Tabel 1.1 angka persentase kemiskinan yang menduduki peringkat nomor 1 terlihat pada provinsi di Papua yang memiliki penduduk miskin paling tinggi yaitu sebesar 27,43% pada tahun 2018, dan menurun sebesar 0,88% pada tahun 2019. Sedangkan angka persentase penduduk paling rendah yang menduduki peringkat nomor 34 adalah provinsi DKI Jakarta dengan 3,55% pada tahun 2018 dan turun menjadi 3,42% pada tahun 2019. Tabel 1.1 di bawah menunjukkan rata-rata persentase kemiskinan pada setiap provinsi di Indonesia setiap tahun selalu mengalami penurunan. Persentase penurunan kemiskinan paling tinggi terdapat pada provinsi Papua Barat sebesar 1,15%. Sedangkan provinsi yang mengalami peningkatan kemiskinan terdapat di provinsi Maluku Utara, pada tahun 2018 persentase kemiskinan sebesar 6,62% naik menjadi 6,9% pada tahun 2019.

Tabel 1.1
Jumlah Persentase dan Peringkat Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2019

No.	Provinsi	2018	2019	Peringkat
1	Aceh	15,68	15,01	6
2	Sumatera Utara	8,94	8,63	17
3	Sumatera Barat	6,55	6,29	25
4	Riau	7,21	6,9	26
5	Jambi	7,85	7,51	19
6	Sumatera Selatan	12,82	12,56	10
7	Bengkulu	15,41	14,91	7
8	Lampung	13,01	12,3	11
9	Kep. Bangka Belitung	4,77	4,5	32
10	Kep. Riau	5,83	5,8	28
11	DKI Jakarta	3,55	3,42	34
12	Jawa Barat	7,25	6,82	23
13	Jawa Tengah	11,19	10,58	15
14	DI. Yogyakarta	11,81	11,44	12
15	Jawa Timur	10,85	10,2	16
16	Banten	5,25	4,94	29
17	Bali	3,91	3,61	33
18	Nusa Tenggara Barat	14,63	13,88	8
19	Nusa Tenggara Timur	21,03	20,62	3
20	Kalimantan Barat	7,37	7,28	21
21	Kalimantan Tengah	5,1	4,81	30
22	Kalimantan Selatan	4,65	4,47	31
23	Kalimantan Timur	6,06	5,91	27
24	Kalimantan Utara	6,86	6,49	24
25	Sulawesi Utara	7,59	7,51	20
26	Sulawesi Tengah	13,69	13,18	9
27	Sulawesi Selatan	8,87	8,56	18
28	Sulawesi Tenggara	11,32	11,04	13
29	Gorontalo	15,83	15,31	5
30	Sulawesi Barat	11,22	10,95	14
31	Maluku	17,85	17,65	4
32	Maluku Utara	6,62	6,91	22
33	Papua Barat	22,66	21,51	2
34	Papua	27,43	26,55	1

Sumber : (BPS, 2019). (Data Diolah).

Salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai wilayah kabupaten kota terbanyak adalah Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota yang memiliki penduduk 150,4 juta jiwa. Jawa Tengah memiliki jumlah kabupaten atau kota terbanyak di Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Kendal, jumlah kecamatan

di Kabupaten Kendal sebanyak 20 kecamatan. Kabupaten Kendal termasuk kabupaten terluas ke 20 di provinsi Jawa Tengah. Dalam data yang dikeluarkan Bappeda Kabupaten Kendal (2020), disebutkan bahwa jumlah seluruh desa atau kelurahan Kabupaten Kendal sebanyak 286 yang terdiri 266 desa dan 20 kelurahan, yang terdiri dari 1.140 dukuh, 1.490 RW dan 6.351 RT. Jumlah penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2019 sebanyak 971.001 jiwa dan jumlah penduduk miskin sebanyak 91,20 ribu jiwa atau 9,41%. Selama 4 tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal selalu mengalami penurunan. Berikut tabel jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kendal tahun 2015-2019.

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kendal Tahun 2015 – 2019

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (Ribu Jiwa)	Persentase
2015	109,27	11,62
2016	107,81	11,37
2017	106,07	11,10
2018	94,70	9,84
2019	91,20	9,41

Sumber : (SUSENAS, 2019). (Data Diolah).

Tren kemiskinan di Kabupaten Kendal setiap tahunnya semakin menurun. Pada tahun 2018 persentase kemiskinan sebesar 9,84% menjadi 9,41% pada tahun 2019 yang artinya mengalami penurunan sebanyak 0,43%. Meski penurunan terlihat kecil namun hal ini menunjukkan jika adanya program untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kendal bisa dikatakan sukses.

Sebanyak 266 desa di Kabupaten Kendal telah menerima manfaat dari adanya program dana desa dan Program Keluarga Harapan oleh Pemerintah Pusat.

Jumlah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adanya program dana desa dan Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan di desa semakin baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga desa di Kabupaten Kendal. Sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar desa dan kota.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Desa dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan pada 12 Desa di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2015-2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian sub bab latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dari program dana desa terhadap kemiskinan pada 12 desa di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal pada tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh dari Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan pada 12 desa di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal pada tahun 2015-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh dari program dana desa dan Program Keluarga Harapan (PKH) secara bersama-sama terhadap kemiskinan pada 12 desa di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal pada tahun 2015-2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh program dana desa terhadap kemiskinan pada 12 desa di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal pada tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan pada 12 desa di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal pada tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh program dana desa dan Program Keluarga Harapan (PKH) secara bersama-sama terhadap kemiskinan pada 12 desa di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal pada tahun 2015-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk :

1) Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah desa Kabupaten Kendal dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan dana desa dan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi masalah ekonomi di desa dalam rangka mengurangi adanya kemiskinan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan desa agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

2) Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan dana desa dan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pembangunan bagi peneliti lain.

1.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah, maka akan dijelaskan hubungan sementara antara variabel-variabel terkait untuk diuji ada atau tidaknya pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Hasil hipotesis sementara penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga pemanfaatan program dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan pada 12 desa di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal pada tahun 2015-2019.
2. Diduga pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan pada 12 desa di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal pada tahun 2015-2019.
3. Diduga pemanfaatan program dana desa dan Program Keluarga Harapan (PKH) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan pada 12 desa di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal pada tahun 2015-2019.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan membagi pembahasan ke dalam lima bab. Adapun untuk masing-masing bab diterangkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang mendasari dalam penelitian dan studi empiris yang pernah dilakukan sebelumnya akan dibahas pada bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini terdiri dari data dan sumber data, teknik pengumpulan data, model penelitian, alat analisis serta definisi operasional yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan mengenai hasil analisis data yang diperoleh, pengujian hipotesis, serta menguraikan pembahasan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup disajikan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang dilakukan yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.